MENELUSURI ORTODOKSI DAN SINTESIS LOKAL: TAREKAT SUFI, JARINGAN ULAMA, SERTA DINAMIKA SEJARAH KEAGAMAAN DI SURAKARTA

Mibtadin[1], Rio Kurniawan[2]
[1]*Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta*
[2]*UIN Raden Mas Said Surakarta*
Corresponding author: mibtadianisahmad@staff.uns.ac.id, rio.kurniawan@staff.uinsaid.ac.id

Abstract

This study examines the dynamics of religious history in Surakarta, focusing on the interaction between sufi orders (*tariqah*) and the role of Muslim scholars (*ulama*) in guiding and shaping social-religious life. As a center of post-Mataram Javanese-Islamic culture and power, Surakarta became a crucial arena where Islamic mystical traditions took deep root and transformed. This research investigates how sufi orders such as the Syattariyah, Naqsyabandiyah, and Tijaniyah flourished within both the royal court environment and the grassroots community, as well as how the *ulama* navigated their positions as guardians of religious tradition and agents of social change. Employing a critical historical method through a socio-historical approach, this paper analyzes archival documents, local religious manuscripts, and biographical records of Surakarta's *ulama*. The findings demonstrate that the networks of *ulama* and sufi order leaders played a strategic dual role. On one hand, they functioned as spiritual legitimators for the royal authority. The *ulama* acted as a bridge connecting global Islamic scholarly traditions from the Middle East with local Javanese cultural synthesis. The transmission of sufi knowledge combined with *sharia* teachings created an inclusive model of religiosity that remained firmly rooted in Islamic orthodoxy. Furthermore, these dynamics reveal that sufi orders and *ulama* were not merely focused on the esoteric realm and spiritual purification, but were also responsive to colonial political shifts and Islamic reform movements in the early 20th century. In conclusion, the harmonious integration among sufi orders, *ulama*, and local cultural pillars established Surakarta as one of the most dynamic religious historical landscapes in Java, leaving an intellectual and spiritual legacy that continues to shape the community's religious identity today.

Keywords: *Religious History, Sufi Orders, Ulama, Surakarta, Islamic Mysticism*

INTRODUCTION

Secara sosiologis, sejarah Islam di Jawa tidak dapat dipahami hanya sebagai proses penyebaran doktrin dan institusi keagamaan *an sich*, tetapi juga proses negosiasi antara tradisi Islam, struktur kekuasaan, jaringan ulama, dan kebudayaan lokal. Dalam konteks ini, Surakarta menempati posisi penting karena sejak pembagian Mataram melalui Perjanjian Giyanti 1755 M, Kasunanan Surakarta berkembang sebagai salah satu pusat politik dan kebudayaan Jawa sekaligus arena penting pembentukan identitas Islam-Jawa. Perkembangan Islam di Surakarta berlangsung melalui masjid, pesantren, karya sastra, jaringan ulama, dan jaringan tarekat yang berinteraksi dengan lingkungan keraton dan masyarakat. Persoalan mendasarnya adalah bagaimana tarekat dan jaringan ulama berperan dalam membentuk sejarah sosial-keagamaan di Surakarta ketika otoritas Islam

harus dinegosiasikan di antara tuntutan ortodoksi, kepentingan politik keraton, tradisi sufistik, kebudayaan Jawa, dan perubahan sosial-politik akibat kolonialisme.

Secara prinsip, jaringan ulama telah memberikan landasan penting untuk memahami perkembangan Islam Nusantara. Menurut Azra (2004), Islam di Nusantara sejak abad ke-17 dan ke-18 tidak berkembang secara terisolasi, tetapi terhubung dengan jaringan intelektual yang mengaitkan ulama Nusantara dengan pusat-pusat keilmuan Islam di Makkah dan Madinah. Jaringan itu menjadi saluran transmisi pengetahuan, tasawuf, fikih, dan gagasan pembaruan Islam. Salah satu karakter penting jaringan itu adalah terbentuknya sintesis antara syariah dan tasawwuf, oleh Azra dikaitkan dengan kecenderungan gerakan Neosufism. Dalam hal ini, Surakarta menunjukkan hubungan antara tasawuf dan ortodoksi tidak selalu bersifat opositional, tetapi dapat membentuk proses sintesis intelektual dan sosial.

Ruang sufisme dalam Islam Jawa menunjukan diskursus yang menarik, serta menunjukkan adanya hubungan yang kuat antara tradisi mistik Islam dan kebudayaan lokal. Menurut Simuh (2002), memperlihatkan bagaimana sufisme Jawa berkembang melalui proses adaptasi dan artikulasi ajaran Islam ke dalam bahasa, simbol, dan sastra Jawa. Nancy K. Florida menilai dunia sastra Keraton Surakarta secara lebih spesifik pengaruh Tarekat Syattariyah pada lingkungan intelektual istana pada abad ke-19 M. Manuskrip dan karya *suluk* seperti *Suluk Acih* adanya hubungan antara perjalanan spiritual, silsilah tarekat, jaringan guru, dan pengalaman intelektual lintas wilayah. Secara umum, manuskrip di keraton memperlihatkan adanya jaringan sufistik Surakarta tidak hanya bersifat lokal, tetapi terhubung dengan perjalanan spiritual dan jaringan keilmuan yang lebih luas. Keraton Surakarta bukan saja sebagai pusat politik, tetapi juga sebagai ruang produksi dan reproduksi pengetahuan keagamaan.

Menurut Azmirrijali, dkk., (2026), perkembangan Tarekat Syattariyah di Keraton Surakarta abad ke-19 M berkaitan erat dengan jaringan sanad ulama Nusantara dan dukungan bangsawan keraton itu sendiri. Hal ini memperkuat pentingnya melihat hubungan antara tarekat dan elite Surakarta. Pergulatan itu mengindakasikan adanya ajaran Syattariyah mengalami penyesuaian dengan kebudayaan lokal dan bangsawan memiliki peranan dalam memperluas keanggotaan tarekat. Kajian keberlanjutan tradisi Syattariyah dalam konteks Perang Jawa menunjukkan jaringan pesantren dan para

pengikut Diponegoro berkontribusi terhadap keberlangsungan tradisi tarekat setelah 1830 M. Artinya, sejarah tarekat di Surakarta tidak dapat dilepaskan dari hubungan antara keraton, ulama, pesantren, dan masyarakat (Fuadi, dkk., 2022).

Narasi di atas secara umum terdapat celah penting dalam penelitian yang sudah dilakukan, yaitu: pertama, sebagian kajian Syattariyah di Surakarta lebih menekankan dimensi sastra, manuskrip, atau hubungan tarekat dengan bangsawan keraton. Kedua, studi mengenai jaringan ulama Nusantara cenderung menggunakan perspektif makro mengenai hubungan Haramain dan dunia Muslim Asia Tenggara (Laffan, 2011). Ketiga, penelitian tentang Naqsyabandiyah hanya membahas doktrin, praktik spiritual, atau pengalaman psikologis pengikut, sedang dinamika historisnya dalam kaitannya dengan transformasi politik dan otoritas keagamaan di Surakarta belum mendapatkan perhatian serius. Padahal, bukti historis menunjukkan paruh kedua abad ke-19 Naqsyabandiyah mengalami kebangkitan di Jawa dan memperoleh posisi penting di lingkungan Keraton Surakarta, sedang karakter tarekat tersebut juga semakin memperlihatkan kecenderungan reformis dengan penekanan yang lebih kuat terhadap praktik-praktik syariat.

Untuk menjelaskan dinamika tersebut, penelitian ini menggunakan perspektif jaringan ulama (*ulama networks*) dan transmisi pengetahuan keagamaan yang dikembangkan Azra. Perspektif jaringan memungkinkan tarekat tidak dipahami sebagai organisasi keagamaan yang berdiri sendiri, tetapi sebagai simpul yang menghubungkan guru dan murid, keraton dan pesantren, pusat keilmuan Timur Tengah dan masyarakat Jawa, serta elite politik dan komunitas akar rumput. Dalam perspektif ini, sanad bukan hanya mekanisme transmisi ajaran, tetapi juga sumber legitimasi otoritas keagamaan (Bruinessen, 1955). Historiografi jaringan ulama Azra secara eksplisit mempertemukan perspektif lokal dan global untuk menjelaskan transmisi pengetahuan Islam. Perspektif tersebut kemudian dikombinasikan dengan pendekatan sejarah sosial untuk melihat bagaimana pengetahuan, otoritas, dan praktik sufistik berubah mengikuti konteks sosial-politik (Bruinessen, 2012).

Kebaruan penelitian ini terletak pada upaya mengintegrasikan sejarah tarekat, jaringan ulama, otoritas keraton, dan transformasi sosial-politik dalam satu kerangka analisis sejarah keagamaan di Surakarta. Artinya, tarekat yang ada seperti Syattariyah, Naqsyabandiyah, dan Tijaniyah sebagai tradisi tarekat yang berdiri sendiri, ketiganya

sebagai bagian dari jaringan transmisi pengetahuan dan negosiasi otoritas yang bergerak antara lokalitas Jawa dan dunia Islam yang lebih luas. Ulama memiliki posisi ganda: sebagai penjaga kesinambungan tradisi Islam sekaligus sebagai mediator perubahan sosial. Sejarah keagamaan Surakarta tidak saja memperlihatkan proses *localization of Islam*, tetapi juga proses *globalization of Islamic knowledge* melalui jaringan ulama dan tarekat (Qomaroyah dan Saifuddin, 2022). Sintesis antara syariat, tasawuf, dan kebudayaan Jawa tersebut menjelaskan mengapa Surakarta dapat berkembang sebagai salah satu lanskap Islam Jawa yang dinamis, di mana ortodoksi dan lokalitas tidak selalu berada dalam hubungan antagonistik, melainkan terus dinegosiasikan melalui jaringan intelektual, spiritual, dan sosial.

RESEARCH METHOD

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif, menggunakan metode sejarah kritis dengan pendekatan sejarah sosial-keagamaan untuk merekonstruksi dinamika tarekat dan jaringan ulama dalam perkembangan kehidupan keagamaan di Surakarta. Pendekatan inidigunakan untuk menempatkan tarekat dan ulama bukan hanya sebagai institusi atau figur keagamaan, tetapi sebagai aktor yang berinteraksi dengan keraton, pesantren, komunitas Muslim, serta perubahan sosial-politik. Proses penelitian mengikuti empat tahapan utama metode sejarah, yaitu heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi (Howell & Prevenier, 2001). Tahap heuristik dilakukan dengan mengumpulkan sumber primer berupa manuskrip keagamaan dan kesusastraan Jawa, arsip keraton, silsilah atau *sanad* tarekat, karya ulama, serta catatan biografis tokoh-tokoh keagamaan Surakarta. Sumber sekunder berupa buku, artikel ilmiah, dan kajian historiografis mengenai Islam Jawa, tarekat, dan jaringan ulama digunakan sebagai pembanding (Azmirrijali, dkk., 2026).

Kritik sumber dilakukan secara eksternal dan internal untuk menguji autentisitas, kronologi, kredibilitas, dan konteks produksi sumber. Data diinterpretasikan dengan perspektif jaringan ulama dan transmisi pengetahuan Islam yang dikembangkan Azra (2004), dengan memperhatikan hubungan lokal-global, sanad keilmuan, serta mobilitas ulama dan tarekat. Pendekatan ini memungkinkan penelitian menelusuri bagaimana pengetahuan Islam dan praktik sufistik ditransmisikan, dinegosiasikan, dan diadaptasikan

dalam konteks sosial-budaya Surakarta. Tahap terakhir adalah historiografi, menyusun rekonstruksi historis mengenai hubungan tarekat, ulama, keraton, dan masyarakat secara kronologis sekaligus analitis (Hakum, dkk., 2021).

RESULTS AND DISCUSSION

Keraton Surakarta, antara Otoritas Politik, Ulama, dan Jaringan Tarekat

Secara sosiologis, Surakarta merupakan ruang historis dan sosial yang mempertemukan otoritas keraton, ulama, pesantren, dan jaringan tarekat dalam proses pembentukan Islam Jawa yang dinamis. Relasi antarelemen tersebut tidak bersifat linear maupun sepenuhnya hierarkis, melainkan berlangsung melalui negosiasi antara kekuasaan simbolik keraton, otoritas keilmuan ulama, transmisi pengetahuan pesantren, dan jaringan spiritual tarekat. Keberadaan Tarekat Syattariyah serta perkembangan Jamsaren, Kauman, Keprabon, dan lingkungan Masjid Agung menunjukkan Islamisasi Surakarta berlangsung melalui jaringan yang menghubungkan tradisi lokal dengan jaringan keislaman yang lebih luas. Menurut *discursive tradition* Talal Asad, proses itu memperlihatkan tradisi Islam terus direproduksi dan dinegosiasikan melalui praktik sosial, institusi, otoritas, dan konteks budaya. Surakarta bukan saja pusat kekuasaan politik kekeuasaan, tetapi juga arena perjumpaan, negosiasi, dan sintesis antara Islam normatif, sufisme, dan kebudayaan Jawa, yang secara historis turut membentuk karakter keberagamaan dan identitas sosial lokal masyarakat Surakarta sampai sekarang.

Dinamika perkembangan tarekat di Surakarta tidak dapat dilepaskan dari posisi kota ini sebagai pusat kekuasaan Keraton Surakarta sekaligus ruang perjumpaan berbagai tradisi intelektual dan spiritual Islam. Sejak berdirinya, Keraton Surakarta pada pertengahan abad ke-18, keraton tidak hanya berfungsi sebagai pusat politik dan kebudayaan Jawa, tetapi juga menjadi salah satu ruang penting artikulasi Islam dalam lingkungan elite. Agama tidak berada di luar struktur kekuasaan, tetapi menjadi bagian dari sistem simbolik yang membentuk legitimasi kerajaan, identitas bangsawan, dan tata kehidupan masyarakat (Azmirrijali, dkk., 2026). Masuk dan berkembangnya tarekat di Surakarta perlu dibaca sebagai fenomena sosial-historis. Tarekat tidak hanya tentang praktik zikir, wirid, suluk, uzalah, dan pembinaan spiritual, tetapi juga membangun jaringan hubungan antara guru dan murid, ulama dan bangsawan, keraton dan pesantren,

serta elite dan masyarakat. Perkembangan tarekat di Surakarta abad ke-19 berlangsung melalui jaringan sanad ulama Nusantara dan memperoleh dukungan kuat dari bangsawan. Tarekat dengan demikian memiliki basis sosial yang melampaui ruang keagamaan formal.

Keraton Surakarta dan tarekat tidak harus dipahami sebagai dua institusi yang terpisah. Keraton menyediakan ruang simbolik, material, dan sosial bagi berkembangnya tradisi keagamaan, sedangkan tarekat menyediakan sumber legitimasi spiritual bagi elite kerajaan. Hubungan ini bersifat timbal balik. Keraton memperoleh legitimasi moral dan spiritual dari ulama serta tradisi sufistik, sementara ulama dan pemimpin tarekat memperoleh ruang sosial untuk mempertahankan dan mengembangkan transmisi pengetahuan Islam. Menurut Bourdieu, relasi tersebut dipahami sebagai pertukaran dan akumulasi modal. Keraton memiliki *political and cultural capital*, sedang ulama dan tarekat memiliki *religious and symbolic capital*. Ketika kedua bentuk modal tersebut berinteraksi, terbentuk suatu konfigurasi kekuasaan yang memungkinkan otoritas keagamaan bekerja melalui struktur sosial kerajaan. Meski hubungan itu tidak sepenuhnya bersifat subordinatif. Ulama tetap memiliki sumber legitimasi yang berasal dari sanad, penguasaan kitab, pengalaman spiritual, dan pengakuan komunitas.

Pada titik ini pentingnya konsep jaringan ulama Azra. Jaringan keulamaan tidak saja menghubungkan guru dengan muridnya, tetapi juga menghubungkan pusat-pusat Islam di Timur Tengah dengan kawasan Asia Tenggara. Transmisi pengetahuan melalui Makkah dan Madinah menciptakan jaringan intelektual yang memungkinkan ajaran fikih, tasawuf, hadis, dan ilmu-ilmu keislaman berkembang di Nusantara (Azra, 2004). Dalam konteks Surakarta, jaringan tersebut kemudian mengalami lokalisasi melalui pesantren, keraton, manuskrip, suluk, dan komunitas Muslim. Surakarta menjadi sebuah node atau simpul dalam jaringan Islam yang lebih luas. Ia bukan sekadar penerima ajaran dari luar, tetapi menjadi ruang produksi kembali pengetahuan Islam dalam bentuk yang sesuai dengan konteks sosial dan budaya Jawa.

Surakarta dapat dipahami bukan sekadar sebagai kota pusat kebudayaan Jawa, tetapi sebagai ruang sosial-keagamaan tempat bertemunya kekuasaan keraton, otoritas ulama, pesantren, dan jaringan tarekat. Posisi tersebut terbentuk melalui proses sejarah yang panjang sejak berdirinya Keraton Surakarta abad ke-18 hingga perkembangan Islam

modern pada abad ke-20 dan transformasi kehidupan keagamaan pada masa kontemporer. Menurut perspektif sejarah sosial Islam, hubungan antara keraton dan ulama tidak tepat dipahami sebagai relasi yang sepenuhnya hierarkis ataupun antagonistik. Keduanya justru membentuk hubungan yang dinamis melalui pertukaran pengetahuan, patronase, legitimasi, mobilitas intelektual, serta jaringan sosial-keagamaan.

Kerangka jaringan ulama Azra penting digunakan membaca fenomena tersebut. Islam berkembang melalui mobilitas ulama, murid, kitab, sanad keilmuan, dan institusi pendidikan yang menghubungkan pusat-pusat Islam di Timur Tengah dengan berbagai wilayah Nusantara (Azra, 2004). Dalam konteks Surakarta, jaringan tersebut memperoleh bentuk lokal melalui hubungan antara keraton, masjid, pesantren, kampung santri, dan komunitas tarekat. Surakarta adalah salah satu simpul dari jaringan Islam Jawa yang mempertemukan dimensi transregional dengan pengalaman lokal. Artinya, jaringan ulama dan sufisme sebagai proses transmisi pengetahuan serta pembentukan otoritas keagamaan yang berlangsung melalui relasi sosial dan historis (Ridwan et al., 2026).

Salah satu bukti paling penting adalah perkembangan Tarekat Syattariyah di lingkungan Keraton Surakarta. Ekspansi Syattariyah di Surakarta pada abad ke-19 berlangsung melalui sanad ulama Nusantara dan memiliki hubungan erat dengan kelompok bangsawan keraton. Bangsawan tidak hanya berfungsi sebagai penerima ajaran, tetapi juga mediator sosial yang memperluas penerimaan tarekat di masyarakat. Perkembangan tarekat tidak berlangsung dalam ruang sosial yang terpisah dari keraton, melainkan berinteraksi dengan struktur sosial-politik Kasunanan (Azmirrijali et al., 2026). Tarekat merupakan institusi sosial sekaligus spiritual, karena menyediakan mekanisme transmisi ajaran melalui mursyid, murid, sanad, majelis, dan praktik ritual; sedang keraton menyediakan ruang legitimasi kultural dan simbolik. Pertemuan keduanya menghasilkan bentuk Islam Jawa yang tidak sepenuhnya dapat dikategorikan sebagai Islam istana ataupun Islam rakyat. Ia merupakan hasil negosiasi antara ortodoksi Islam, spiritualitas sufistik, dan kebudayaan Jawa. Menurut Ricklefs (2006), proses Islamisasi Jawa memang tidak berlangsung melalui penggantian kebudayaan secara total, tetapi melalui proses sintesis, negosiasi, dan transformasi yang berlangsung dalam waktu panjang.

Relasi Keraton Surakarta dan ulama juga tampak pada perkembangan pendidikan Islam tradisional, dan Pesantren Jamsaren adalah contoh penting. Institusionalisasi pendidikan Islam tradisional di Surakarta pada 1905–1942 bertumpu pada Jamsaren yang memiliki hubungan independen tetapi kooperatif dengan Kasunanan. Pendidikan Islam berkembang bukan di luar struktur keraton, tetapi melalui hubungan yang memungkinkan terjadinya negosiasi antara otoritas keagamaan dan kekuasaan tradisional (Ali et al., 2025).

Relasi itu berkembang menjadi jaringan ulama yang lebih kompleks pada awal abad ke-20. Penelitian Ali (2021), misalnya, menunjukkan adanya beberapa poros jaringan ulama di Surakarta yang berinteraksi dengan K.H. Ahmad Dahlan, antara lain Poros Islam Pangulon–Kauman, Pondok Jamsaren, dan Keprabon. Jaringan ini memperlihatkan bahwa Surakarta merupakan ruang perjumpaan antara tradisi keislaman pesantren, otoritas keraton, dan gagasan pembaruan Islam. Dalam konteks ini, Kauman, Jamsaren, Masjid Agung, dan lingkungan keraton dilihat sebagai simpul sosial yang menghubungkan berbagai bentuk otoritas. Otoritas tidak hanya berasal dari status bangsawan atau struktur birokrasi keagamaan, tetapi juga dari kapasitas ulama dalam menguasai ilmu agama, sanad keilmuan, kemampuan mengajar, serta hubungan dengan murid dan masyarakat. Otoritas keagamaan di Surakarta bersifat berlapis: terdapat otoritas tradisional keraton, otoritas keilmuan ulama, otoritas spiritual mursyid, dan kemudian otoritas organisasi Islam modern.

Menurut Talal Asad (1993), dalam *discursive tradition* bahwa tradisi Islam tidak dipahami sebagai seperangkat doktrin yang statis, melainkan sebagai praktik diskursif yang terus diproduksi dan dinegosiasikan dalam konteks sosial tertentu. Dalam kasus Surakarta, ajaran Islam, sufism, tradisi keraton, dan praktik kebudayaan Jawa mengalami proses artikulasi berulang. Tarekat menjadi salah satu medium penting dalam proses tersebut karena ia menghubungkan teks, sanad, praktik ritual, etika, tubuh, dan kehidupan sosial. Artinya, jaringan sufisme dan ulama di Jawa Tengah menunjukkan tradisi Islam lokal terbentuk melalui negosiasi historis antara Islam, otoritas keagamaan, dan konteks budaya setempat (Ridwan et al., 2026). Surakarta dipahami sebagai "ruang pertemuan" (*melting pot* atau *contact zone*) daripada sekadar pusat kekuasaan politik tradisional. Keraton menyediakan legitimasi simbolik dan ruang kultural; ulama menyediakan

otoritas pengetahuan; pesantren menyediakan institusi transmisi ilmu; sedangkan tarekat menyediakan jaringan spiritual dan sosial yang melampaui batas sosial geografis maupun kelas sosial. Hubungan tersebut menjadikan Surakarta sebagai salah satu laboratorium penting untuk memahami pembentukan Islam Jawa.

Pada masa sekarang, warisan tersebut tetap terlihat meskipun mengalami transformasi. Tradisi seperti Sekaten, misalnya, terus mengalami reinterpretasi akibat perkembangan pariwisata, budaya populer, dan media digital. Sekaten kini tidak hanya dipahami sebagai ritual keagamaan, tetapi juga sebagai ruang budaya, hiburan, pendidikan informal, dan ekspresi digital generasi muda (Sholikhah et al., 2025). Artinya, sejarah Surakarta dapat dibaca sebagai sejarah negosiasi antara agama, kekuasaan, jaringan sosial, dan kebudayaan. Keraton tidak sekadar menjadi latar politik bagi perkembangan Islam, sedang ulama dan tarekat tidak sekadar menjadi aktor keagamaan yang berada di luar kekuasaan. Keduanya saling berinteraksi, bernegosiasi, bahkan membentuk ruang sosial bersama. Dari perspektif tersebut, jaringan tarekat di Surakarta merupakan bagian integral dari sejarah pembentukan otoritas keagamaan, identitas Islam-Jawa, dan dinamika kebudayaan masyarakat Surakarta.

Transformasi Gerakan Sufisme di Surakarta: Antara Tarekat dan Pergeseran Basis Sosial dari Keraton ke Pesantren

Secara sosiologis, transformasi sufisme di Surakarta adalah proses historis yang memperlihatkan perubahan penting dalam hubungan antara agama, kekuasaan, kebudayaan, dan masyarakat. Pada periode awal perkembangan Keraton Surakarta, sufism memiliki hubungan kuat dengan keraton dan bangsawan, maka memasuki abad ke-19 hingga abad ke-20 basis sosialnya secara bertahap meluas ke pesantren, ulama, majelis taklim, dan komunitas Muslim di luar lingkungan istana. Perubahan itu tidak berarti keraton kehilangan seluruh peran dalam perkembangan sufisme, tetapi terjadi pergeseran pusat produksi dan reproduksi otoritas sufistik: dari otoritas yang banyak ditopang patronase aristokrasi menuju otoritas yang semakin ditentukan oleh sanad ulama, pesantren, jaringan murid, dan kemampuan kiai membangun komunitas. Dalam proses tersebut, Tarekat Syattariyah, Naqsyabandiyah, dan Tijaniyah memiliki karakter

dan kontribusi yang berbeda dalam membentuk wajah sufisme dan keagamaan secara umum di Surakarta.

Pertama, Tarekat Syattariyah, dari sufisme keraton menuju jaringan ulama dan masyarakat. Tarekat Syattariyah merupakan salah satu pintu penting untuk memahami hubungan awal antara sufisme dan keraton Surakarta. Penelitian terbaru Azmirrijali et al. (2026) menunjukkan perkembangan Syattariyah di Kasunanan Surakarta pada abad ke-19 mempunyai hubungan erat dengan bangsawan keraton. Tarekat ini masuk melalui jaringan sanad ulama Nusantara yang terhubung dengan pusat-pusat keilmuan Islam di Haramain, terutama melalui Abdurrauf al-Singkili dan jaringan Syattariyah yang berkembang di Jawa. Perkembangan Syattariyah tidak berhenti pada transmisi doktrin, tetapi juga menghasilkan hubungan sosial antara ulama, bangsawan, pujangga keraton, dan masyarakat.

Dalam lingkungan Keraton Surakarta, Tarekat Syattariyah menunjukkan kemampuan melakukan lokalisasi sufisme. Ajaran mengenai martabat manusia, insan kamil, dan perjalanan spiritual diterjemahkan ke dalam bahasa budaya Jawa melalui suluk, serat, dan tradisi kepujanggaan. Sufisme tidak tampil sebagai ajaran yang sepenuhnya asing bagi kebudayaan Jawa. Sebaliknya, ia menjadi bagian dari produksi pengetahuan dan sastra keraton. Keterlibatan bangsawan dan pujangga menunjukkan pengamalan tarekat sekaligus sebagai mekanisme pembentukan identitas elite Muslim-Jawa. Basis keraton bukan satu-satunya basis sosial Syattariyah. Jaringan pesantren telah menjadi sarana penting penyebaran tarekat. Menurut Azmirrijali et al. (2026), pesantren membantu memperluas ajaran Syattariyah di luar lingkungan istana, sementara hubungan ulama dan bangsawan menciptakan jembatan antara dua ruang sosial tersebut. Sejak abad ke-19 sebenarnya telah muncul embrio pergeseran dari sufisme istana menuju sufisme berbasis jaringan. Pergeseran tersebut menjadi semakin penting ketika otoritas politik keraton mengalami penyempitan akibat kolonialisme. Ketika kekuasaan politik formal Kasunanan semakin terbatas, sebagian otoritas simbolik dan kultural tetap dipertahankan melalui sastra, ritual, pendidikan agama, dan spiritualitas. Sufisme menjadi salah satu ruang tempat identitas dan otoritas budaya keraton direproduksi (Fanani, A. (2012)). Pada saat yang sama, ulama dan pesantren semakin memiliki kapasitas independen dalam mendistribusikan pengetahuan dan praktik keagamaan.

Kedua, Tarekat Naqsabandiyah untuk penguatan syariat dan disiplin spiritual masyarakat Surakarta. Apabila Tarekat Syattariyah mempunyai karakter adaptif terhadap kebudayaan lokal, Naqsyabandiyah dapat ditempatkan sebagai salah satu kekuatan penting dalam penguatan disiplin syariat, dzikir, dan pembentukan etika individual. Naqsyabandiyah dan Syattariyah sama-sama hadir dalam lingkungan pendidikan keislaman keraton (Shofwan dkk., 2025). Bahkan, pengajaran tarekat kepada lingkungan keraton mencakup Naqsyabandiyah, Akmaliyah, Hurufiyah, dan Syattariyah. Hal ini menunjukkan batas antar-tarekat pada masa awal tidak selalu eksklusif (Illahiyah, dkk., 2024). Seorang ulama atau elite Muslim dapat menerima lebih dari satu sanad atau mengembangkan sintesis praktik spiritual. Tarekat di Keraton Surakarta menunjukkan adanya hubungan dan persinggungan antara Syattariyah dan Naqsyabandiyah. Bahkan dalam tradisi Surakarta, istilah Isbandiyah muncul dalam konteks sintesis praktik sufistik yang mempertemukan unsur kedua tarekat tersebut.

Secara psikologi sosial, Naqsyabandiyah penting karena menawarkan bentuk sufisme yang relatif kuat dalam pengendalian diri, disiplin spiritual, dan keterikatan dengan syariat. Karakter semacam ini membuatnya memiliki kapasitas untuk beradaptasi dengan perubahan masyarakat Muslim yang semakin terdidik dan terorganisasi. Ketika pusat kehidupan Islam mulai bergeser dari istana ke pesantren, karakter sufisme yang menekankan disiplin, pembinaan murid, dan hubungan guru-murid menjadi kompatibel dengan sistem pendidikan pesantren. Naqsyabandiyah berkontribusi pada transformasi sufisme melalui pendisiplinan spiritual dan penguatan otoritas ulama (Azmirrijali et al. (2026). Dalam keraton legitimasi dapat diperoleh melalui status bangsawan, dalam model pesantren legitimasi semakin bergantung pada sanad, penguasaan kitab, reputasi guru, jumlah murid, dan kemampuan membangun komunitas. Pergeseran ini adalah salah satu ciri utama perubahan sosial sufisme Surakarta.

Perkembangan Naqsyabandiyah di Surakarta memperlihatkan dinamika yang berbeda. Jika Syattariyah kuat dalam lingkungan manuskrip, sastra, dan budaya keraton, Naqsyabandiyah berkembang melalui jaringan ulama dan pesantren yang lebih luas. Karakter Naqsyabandiyah yang menekankan dzikir, disiplin spiritual, keterikatan dengan syekh, dan hubungan yang relatif kuat dengan syariat memungkinkan tarekat ini berkembang dalam pesantren. Kajian manuskrip Naqsyabandiyah di Nusantara

menunjukkan transmisi ajaran melalui karya-karya yang menjelaskan dzikir khafi, *muraqabah*, *tawajjuh*, dan hubungan spiritual antara salik dengan syekh. Di Surakarta, jaringan Naqsyabandiyah terhubung dengan pesantren dan tokoh seperti KH Manshur Popongan Klaten. Di Kauman Surakarta, ia memiliki rumah yang digunakan untuk mengembangkan latihan spiritual Naqsyabandiyah dan dibantu oleh muridnya, Nyai Muharromah. Hal ini menunjukkan perubahan penting dalam struktur sosial tarekat. Otoritas spiritual tidak lagi hanya berada di lingkungan keraton, tetapi telah bergerak menuju ruang-ruang komunitas, rumah ulama, pesantren, dan jaringan pengajian (Illahiyah, dkk., 2024). Perkembangan tarekat bukan institusi yang statis, ia mampu menyesuaikan diri dengan perubahan struktur masyarakat. Ketika pusat kekuasaan kerajaan mengalami perubahan akibat kolonialisme dan modernisasi, jaringan tarekat dapat bertahan karena memiliki basis sosial alternatif.

Ketiga, Tarekat Tijaniyah dan perluasan sufisme ke ruang sosial Muslim modern. Berbeda dengan Syattariyah yang mempunyai jejak historis kuat dalam lingkungan keraton Surakarta dan Naqsyabandiyah yang juga berhubungan dengan pendidikan elite keraton, posisi Tijaniyah perlu dibaca secara lebih hati-hati. Bukti yang tersedia tidak menunjukkan Tijaniyah memiliki peran yang sama kuatnya dengan Syattariyah dalam sejarah keraton Surakarta abad ke-18–19. Tarekat Tijaniyah menjadi entitas penting dalam kerangka transformasi sufism ke ruang sosial masyarakat Muslim yang lebih luas, terutama dalam perkembangan sufisme Indonesia modern. Tijaniyah memiliki karakter organisasi dan jaringan yang memungkinkan pembentukan komunitas melalui *muqaddam*, pengajaran wirid, majelis, dan hubungan langsung antara guru dan pengikut. Studi mengenai gerakan dakwah Tijaniyah menunjukkan bahwa tarekat dapat dikembangkan melalui pendekatan dakwah yang lebih komunikatif dan berorientasi pada pembinaan masyarakat.

Dalam konteks Surakarta, keberadaan Tijaniyah lebih produktif dianalisis sebagai bagian dari pluralisasi lanskap sufism, bukan sebagai pengganti Syattariyah atau Naqsyabandiyah. Jika Tarekat Syattariyah mewakili fase kuatnya hubungan sufisme dengan keraton dan sastra Jawa, Tarekat Naqsyabandiyah merepresentasikan penguatan disiplin dan jaringan ulama, maka Tijaniyah dapat ditempatkan dalam perkembangan berikutnya ketika tarekat semakin hadir sebagai komunitas keagamaan yang tidak

bergantung pada patronase aristokrasi. Secara genealogis, bukti mengenai Tijaniyah di Surakarta perlu ditelusuri lebih lanjut melalui arsip tarekat, sanad lokal, kesaksian muqaddam, dan jaringan pesantren. Tijaniyah berguna untuk menunjukkan sufism Indonesia terus mengalami diferensiasi dan tidak berhenti pada tarekat-tarekat yang berakar kuat pada periode Mataram.

Tarekat Syattariyah merupakan salah satu bukti paling kuat mengenai hubungan antara jaringan Islam transregional dan kebudayaan Islam Jawa. Secara historis, Syattariyah berkembang di Nusantara melalui jaringan ulama yang menghubungkan India, Haramain, Aceh, Jawa, dan berbagai wilayah lainnya. Abdurrauf al-Singkili menjadi salah satu figur sentral dalam proses transmisi tersebut. Jaringan sanad yang berkembang setelahnya memungkinkan ajaran Syattariyah memasuki berbagai ruang sosial Nusantara. Di Surakarta, keberadaan Syattariyah dapat ditelusuri melalui manuskrip, suluk, silsilah, dan karya para pujangga. Florida menunjukkan bahwa dunia sastra Keraton Surakarta pada abad ke-19 memiliki hubungan erat dengan tradisi Syattariyah. Perjalanan pujangga Surakarta ke Aceh pada tahun 1815 M memperlihatkan hubungan spiritual dan intelektual tidak berhenti pada batas geografis Jawa. Tradisi sastra keraton menjadi salah satu medium penting untuk mengartikulasikan pengetahuan sufistik.

Data mengenai sanad Syattariyah memperlihatkan adanya rantai transmisi yang panjang, mulai dari tokoh-tokoh Timur Tengah dan India, Abdurrauf al-Singkili, Abdul Muhyi Pamijahan, hingga jaringan ulama Jawa dan lingkungan Kasunanan. Salah satu penelitian terbaru bahkan menunjukkan hubungan sanad yang mengarah kepada tokoh-tokoh seperti Kiai Abdul Arif dan figur yang berkaitan dengan Susuhunan Pakubuwana IV. Sanad dalam konteks tersebut memiliki makna yang jauh lebih luas daripada sekadar daftar guru dan murid. Sanad merupakan mekanisme legitimasi otoritas. Seorang tokoh memperoleh legitimasi bukan hanya karena mampu mengajarkan doktrin tasawuf, tetapi karena ia dapat menunjukkan hubungan genealogis intelektual dan spiritual dengan guru sebelumnya. Oleh karena itu, sanad bekerja sebagai bentuk *symbolic capital* yang memungkinkan seorang ulama memperoleh pengakuan dalam komunitas.

Namun, jaringan Syattariyah di Surakarta tidak sekadar menyalin model sufisme dari pusat-pusat Islam. Ajarannya mengalami proses adaptasi dengan kebudayaan lokal.

Tarekat Syattariyah di Kasunanan Surakarta mengalami penyesuaian dengan ajaran dan kebudayaan lokal serta mendapat dukungan dari kalangan bangsawan yang kemudian ikut mendorong penyebarannya di masyarakat. Fenomena ini memperlihatkan apa yang terjadi bukanlah sekadar "Islamisasi budaya Jawa", melainkan juga Jawanisasi ekspresi Islam. Dua proses tersebut berlangsung secara bersamaan. Islam memberikan kerangka normatif terhadap praktik spiritual masyarakat, sementara kebudayaan Jawa menyediakan bahasa simbolik dan estetika untuk mengartikulasikan pengalaman keagamaan. Hal tersebut terlihat dalam tradisi *suluk* dan *serat*. Bahasa dan simbol Jawa digunakan untuk menjelaskan konsep-konsep spiritual Islam, sementara struktur pemikiran Islam memberikan kerangka bagi pencarian makna kehidupan. Dengan demikian, hubungan antara Islam dan budaya Jawa bersifat dialogis. Fenomena tersebut juga dapat dibaca melalui perspektif Talal Asad mengenai *discursive tradition*. Tradisi Islam tidak hadir sebagai paket doktrin yang tidak berubah, tetapi terus direproduksi melalui praktik, pembelajaran, argumentasi, dan pembentukan subjek (Asad, 1986). Syattariyah di Surakarta memperlihatkan bagaimana tradisi tersebut terus diterjemahkan melalui manuskrip, pengajaran ulama, praktik suluk, dan kehidupan sosial keraton.

Salah satu temuan penting dari sejarah Syattariyah di Surakarta adalah besarnya peran bangsawan. Kalangan bangsawan bukan hanya menjadi pengikut tarekat, tetapi juga berfungsi sebagai mediator penyebaran tradisi spiritual kepada lingkungan sosial yang lebih luas. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa banyak bangsawan Kasunanan mengikuti Syattariyah dan bahwa keterlibatan mereka turut memperluas daya tarik tarekat. Fenomena ini penting karena memperlihatkan bahwa penyebaran Islam sufistik tidak selalu bergerak dari ulama kepada masyarakat melalui jalur pesantren. Dalam kasus Surakarta, ia juga bergerak secara horizontal dan vertikal melalui jaringan elite kerajaan. Secara filosofis, fenomena tersebut memperlihatkan hubungan antara kekuasaan dan spiritualitas. Kekuasaan membutuhkan legitimasi, sedangkan spiritualitas membutuhkan ruang sosial untuk berkembang. Tarekat kemudian menjadi ruang pertemuan keduanya. Namun, tidak tepat jika hubungan tersebut direduksi sebagai instrumentalisasi agama oleh keraton. Tarekat memiliki logika internal sendiri yang berakar pada disiplin spiritual, hubungan guru-murid, dan pencarian kedekatan dengan Tuhan. Hubungan antara tarekat dan keraton lebih tepat dipahami sebagai negosiasi otoritas. Dalam konteks tersebut,

ulama memiliki posisi strategis. Mereka dapat menjadi bagian dari lingkungan kerajaan, tetapi sekaligus mempunyai otoritas yang bersumber dari tradisi keilmuan Islam. Posisi ganda ini memungkinkan ulama menjadi mediator antara dunia keraton dan masyarakat Muslim. Ulama tidak hanya berfungsi sebagai "penjaga agama", tetapi juga sebagai *broker* budaya dan spiritual. Mereka menerjemahkan bahasa agama ke dalam konteks Jawa dan menerjemahkan simbol-simbol kebudayaan Jawa ke dalam kerangka Islam.

Perkembangan Islam di Surakarta pada abad ke-19 dan awal abad ke-20 memperlihatkan semakin kuatnya hubungan antara keraton dan jaringan pesantren. Relasi intelektual antara Kasunanan Surakarta dan Pesantren Gebang Tinatar Tegalsari, misalnya, menunjukkan bahwa hubungan keagamaan tidak berhenti pada lingkungan keraton. Kajian terhadap manuskrip *Ihya' Ulumuddin*, kitab-kitab keislaman, dan arsip kolonial menunjukkan adanya jaringan keilmuan yang menghubungkan Kasunanan dengan pesantren di Ponorogo. Perubahan ini penting karena memperlihatkan proses desentralisasi otoritas keagamaan. Jika pada periode tertentu keraton menjadi salah satu pusat produksi simbolik Islam, maka kemudian pesantren berkembang sebagai pusat alternatif transmisi pengetahuan dan pembentukan ulama. Pada awal abad ke-20, jaringan pesantren di wilayah Surakarta semakin kompleks. Kajian M. Bagus Sekar Alam menunjukkan keberadaan sejumlah pesantren dan lembaga pendidikan penting seperti Jamsaren, Mambaul Ulum, Mangkuyudan, Popongan, Tempursari, dan Jenengan. Santri berpindah dari satu pesantren ke pesantren lain untuk memperdalam disiplin keislaman yang berbeda. Mobilitas tersebut kemudian membentuk jaringan intelektual antarpesantren dan antargenerasi ulama. Pesantren dengan demikian menjadi infrastruktur sosial jaringan ulama. Ia bukan hanya tempat pendidikan, tetapi juga tempat reproduksi otoritas keagamaan. Seorang santri memperoleh pengetahuan dari beberapa guru, membangun hubungan sosial, kemudian kembali ke masyarakat dan mendirikan jaringan pengajian atau pesantren baru. Jika keraton menghasilkan legitimasi simbolik, pesantren menghasilkan reproduksi intelektual. Keduanya tidak selalu berkompetisi, tetapi dapat saling melengkapi.

Berbeda dengan Syattariyah dan Naqsyabandiyah, posisi Tijaniyah dalam sejarah Surakarta memerlukan kehati-hatian analitis. Sumber yang tersedia menunjukkan bahwa Tijaniyah berkembang kuat di sejumlah wilayah Jawa, terutama melalui jaringan ulama

dan pesantren pada abad ke-20. Salah satu studi mengenai Tijaniyah di Brebes, misalnya, memperlihatkan bagaimana seorang ulama yang sebelumnya belajar di berbagai pesantren termasuk Jamsaren Solo kemudian memperoleh baiat dan posisi sebagai *muqaddam* Tijaniyah. Data tersebut menarik karena menunjukkan bahwa Surakarta dapat berfungsi sebagai ruang transit dan pembentukan jaringan intelektual, meskipun tidak otomatis menjadi pusat Tijaniyah itu sendiri. Di sinilah pentingnya membedakan antara "kehadiran tarekat" dan "pusat perkembangan tarekat". Seorang ulama yang belajar di Jamsaren atau lingkungan pesantren Surakarta kemudian menjadi bagian dari jaringan Tijaniyah di daerah lain menunjukkan bahwa Surakarta memiliki peran sebagai hub reproduksi ulama, tetapi belum cukup untuk menyimpulkan bahwa Tijaniyah telah menjadi kekuatan dominan di Surakarta.

Secara historiografis, kehati-hatian tersebut justru memperkuat argumentasi penelitian. Lanskap tarekat Surakarta tidak dibangun oleh satu tarekat yang homogen, tetapi oleh jaringan yang berubah dari waktu ke waktu. Syattariyah memiliki jejak kuat pada lingkungan keraton dan manuskrip abad ke-19; Naqsyabandiyah berkembang melalui jaringan ulama dan pesantren; sedangkan Tijaniyah lebih tepat ditempatkan dalam perkembangan jaringan keulamaan dan tarekat pada periode berikutnya. Sejarah tarekat Surakarta bukan sejarah pergantian sederhana dari satu tarekat ke tarekat lain, melainkan sejarah tumpang tindih jaringan. Salah satu karakter penting jaringan tarekat adalah bahwa seseorang tidak selalu hanya terikat pada satu jalur spiritual. Bahkan dalam sejarah jaringan ulama Nusantara, seorang ulama dapat menerima ijazah dari lebih dari satu tarekat. Temuan mengenai Abdurrauf al-Singkili, misalnya, menunjukkan bahwa ia memiliki hubungan dengan Syattariyah sekaligus Naqsyabandiyah, meskipun kemudian lebih dikenal sebagai penyebar Syattariyah. Fenomena tersebut memperlihatkan bahwa kategori "Syattariyah" dan "Naqsyabandiyah" tidak selalu bersifat eksklusif. Dalam praktik sejarah, jaringan spiritual dapat saling bersinggungan.

Pergeseran paling penting dalam transformasi sufisme Surakarta adalah perubahan basis sosial otoritas. Pada fase awal, keraton merupakan salah satu pusat legitimasi kebudayaan dan keagamaan. Bangsawan dapat menjadi murid, pelindung, bahkan penulis karya-karya sufistik. Dalam kasus Syattariyah, para bangsawan bahkan berperan penting dalam r eproduksi ajaran melalui manuskrip dan sastra Jawa-Islam.

Memasuki abad ke-20, konfigurasi itu berubah. Pesantren berkembang menjadi institusi yang relatif mandiri dalam memproduksi ulama dan mendistribusikan pengetahuan Islam. Kajian mengenai jaringan genealogis intelektual ulama pesantren di wilayah Surakarta menunjukkan bahwa pesantren menjadi basis reproduksi ulama sejak awal abad ke-20 dan jaringan tersebut berlangsung lintas generasi. Dengan demikian, otoritas keagamaan tidak lagi bergantung sepenuhnya pada hubungan dengan keraton.

Dalam konteks ini, pesantren menjadi infrastruktur sosial baru bagi sufisme. Di pesantren, tarekat tidak hanya diajarkan sebagai doktrin, tetapi dipraktikkan melalui zikir, wirid, pengajian, adab, hubungan kiai-santri, dan pembentukan komunitas. Otoritas kiai terbentuk melalui kombinasi sanad keilmuan, kesalehan, kemampuan mengajar, dan pengakuan sosial. Struktur tersebut memungkinkan sufisme menjangkau masyarakat petani, pedagang, santri, buruh, dan kelompok Muslim perkotaan yang tidak memiliki hubungan genealogis dengan aristokrasi. Perubahan ini dapat disebut sebagai demokratisasi sosial sufisme, meskipun istilah tersebut perlu digunakan secara hati-hati. Yang berubah bukan prinsip hierarki spiritualnya—hubungan mursyid dan murid tetap hierarkis—melainkan basis sosial pengikut dan sumber legitimasi. Seorang petani atau pedagang dapat menjadi murid tarekat tanpa harus mempunyai status aristokrat. Sebaliknya, seorang kiai desa dapat memperoleh otoritas spiritual yang lebih besar daripada seorang bangsawan apabila memiliki sanad, reputasi keilmuan, dan jaringan murid yang luas.

Perubahan ini dapat dijelaskan melalui konsep jaringan ulama Azyumardi Azra (2004). Islam Nusantara berkembang melalui mobilitas guru, murid, kitab, sanad, dan perjalanan intelektual. Dalam model ini, otoritas tidak hanya bergerak secara vertikal dari keraton kepada masyarakat, tetapi secara horizontal melalui jaringan ulama dan pesantren. Konsekuensinya adalah munculnya model baru transmisi sufisme. Pada model keraton, arah transmisi cenderung bergerak dari ulama menuju elite dan dari elite menuju lingkungan sosialnya. Pada model pesantren, transmisi bergerak melalui jaringan kiai–santri–alumni–masyarakat. Seorang alumni pesantren dapat membuka pesantren baru, menjadi mursyid, atau mendirikan majelis taklim di daerah lain. Dengan demikian, jaringan sufisme menjadi semakin desentralistik, multipolar, dan berlapis. Talal Asad (1993) membantu memperjelas proses tersebut melalui konsep *discursive tradition*.

Tradisi Islam tidak pernah sekadar diwariskan secara mekanis, tetapi terus diproduksi melalui hubungan antara teks, praktik, otoritas, dan konteks sosial. Sufisme Surakarta memperlihatkan proses tersebut dengan jelas. Syattariyah bernegosiasi dengan budaya Jawa; Naqsyabandiyah menegaskan disiplin syariat dan spiritualitas; sementara tarekat-tarekat yang berkembang kemudian memasuki lingkungan sosial baru melalui pesantren dan organisasi masyarakat.

Perubahan sufisme di Surakarta tidak terutama berupa perubahan dari "tarekat lama" menuju "tarekat baru", tetapi perubahan ruang sosial tempat sufisme memperoleh legitimasi. Keraton merupakan ruang awal yang sangat penting dalam produksi legitimasi sufistik, khususnya bagi Syattariyah dan Naqsyabandiyah. Akan tetapi, perkembangan kolonialisme, modernisasi pendidikan, pertumbuhan kota, munculnya kelas menengah Muslim, dan perkembangan pesantren menyebabkan pusat gravitasi sufisme semakin bergeser kepada ulama dan masyarakat. Pergeseran ini juga mengubah fungsi sosial tarekat. Dari yang semula erat dengan spiritualitas elite dan kebudayaan istana, tarekat semakin berfungsi sebagai sarana pembinaan moral masyarakat, solidaritas sosial, pendidikan keagamaan, dan pembentukan identitas Muslim. Karena itu, sufisme tidak menghilang ketika modernitas datang; ia justru bertransformasi secara institusional dan sosial.

Transformasi sufisme di Surakarta memperlihatkan proses panjang dari sufisme berbasis keraton menuju sufisme berbasis jaringan ulama, pesantren, dan masyarakat. Syattariyah memainkan peranan penting pada fase awal melalui hubungan erat dengan bangsawan, pujangga, manuskrip, dan kebudayaan keraton; Naqsyabandiyah memperkuat dimensi disiplin spiritual, syariat, dan otoritas guru; sedangkan Tijaniyah lebih tepat ditempatkan dalam fase pluralisasi dan perluasan sufisme ke ruang sosial Muslim yang lebih modern, dengan catatan bahwa bukti khusus mengenai genealoginya di Surakarta masih membutuhkan penelitian lebih lanjut. Pergeseran dari keraton ke pesantren bukanlah pemutusan sejarah, melainkan reartikulasi otoritas: dari patronase aristokrat menuju sanad ulama, dari istana menuju pesantren, dan dari kelompok elite menuju komunitas masyarakat. Dengan demikian, sejarah sufisme Surakarta menunjukkan bahwa tarekat merupakan tradisi yang adaptif, mampu mempertahankan

kesinambungan spiritual sekaligus mengubah basis sosial, institusi, dan strategi transmisinya sesuai perubahan zaman.

Tarekat, Ulama, dan Perubahan Sosial pada Awal Abad ke-20

Perkembangan Islam di Surakarta pada abad ke-19 dan awal abad ke-20 memperlihatkan semakin kuatnya hubungan antara keraton dan jaringan pesantren. Relasi intelektual antara Keraton Surakarta dan Pesantren Gebang Tinatar Tegalsari, misalnya, menunjukkan hubungan keagamaan tidak berhenti pada lingkungan keraton. Kajian terhadap manuskrip *Ihya' Ulumuddin,* kitab-kitab keislaman, dan arsip kolonial menunjukkan adanya jaringan keilmuan yang menghubungkan Kasunanan dengan pesantren di Ponorogo. Perubahan ini penting karena memperlihatkan proses desentralisasi otoritas keagamaan. Jika pada periode tertentu keraton menjadi salah satu pusat produksi simbolik Islam, maka kemudian pesantren berkembang sebagai pusat alternatif transmisi pengetahuan dan pembentukan ulama. Pada awal abad ke-20, jaringan pesantren di wilayah Surakarta semakin kompleks. Keberadaan sejumlah pesantren dan lembaga pendidikan penting seperti Jamsaren, Mambaul Ulum, Mangkuyudan, Popongan, Tempursari, dan Jenengan. Santri berpindah dari satu pesantren ke pesantren lain untuk memperdalam disiplin keislaman yang berbeda. Mobilitas tersebut kemudian membentuk jaringan intelektual antarpesantren dan antargenerasi ulama. Pesantren dengan demikian menjadi infrastruktur sosial jaringan ulama. Ia bukan hanya tempat pendidikan, tetapi juga tempat reproduksi otoritas keagamaan. Seorang santri memperoleh pengetahuan dari beberapa guru, membangun hubungan sosial, kemudian kembali ke masyarakat dan mendirikan jaringan pengajian atau pesantren baru. Jika keraton menghasilkan legitimasi simbolik, pesantren menghasilkan reproduksi intelektual. Keduanya tidak selalu berkompetisi, tetapi dapat saling melengkapi.

Awal abad ke-20 merupakan periode penting dalam sejarah sosial-keagamaan Jawa karena ditandai oleh perubahan struktur kolonial, pertumbuhan kota, perkembangan pendidikan, mobilitas sosial, munculnya pers dan organisasi modern, serta meningkatnya kesadaran kolektif masyarakat Muslim. Dalam konteks tersebut, tarekat dan ulama tidak tepat diposisikan sebagai unsur tradisional yang berhadapan secara diametral dengan modernitas. Sebaliknya, keduanya merupakan aktor yang melakukan negosiasi, adaptasi,

dan reinterpretasi terhadap perubahan sosial. Surakarta menjadi salah satu ruang yang sangat penting untuk melihat proses tersebut karena kota ini mempertemukan Kasunanan, jaringan pesantren, ulama, pedagang Muslim, organisasi Islam, dan berbagai jaringan tarekat. Pada pergantian abad ke-20 Surakarta menjadi salah satu pusat penting munculnya gerakan Islam baru, terutama Sarekat Islam dan kemudian Muhammadiyah, sementara jaringan ulama lokal tetap memainkan peranan penting dalam menerima dan menegosiasikan gagasan pembaruan Islam (Ali, 2021)

Dalam perspektif sejarah sosial, tarekat pada awal abad ke-20 dapat dipahami sebagai institusi yang menghubungkan spiritualitas individual dengan kehidupan sosial kolektif. Tarekat memang berangkat dari hubungan spiritual antara *mursyid* dan *murid*, tetapi hubungan tersebut menghasilkan jaringan sosial yang jauh lebih luas melalui sanad, keluarga, pesantren, majelis, perdagangan, dan hubungan antarkomunitas. Silsilah tarekat bukan hanya legitimasi spiritual, melainkan juga mekanisme transmisi pengetahuan dan pembentukan jaringan intelektual. Kajian mengenai hubungan pesantren, kiai, dan tarekat menunjukkan bahwa kesinambungan sanad membangun hubungan intelektual dan sosial antarpesantren serta ikut memengaruhi sikap sosial-politik komunitas Muslim Jawa (Anwar, 2016). Tarekat memiliki kapasitas untuk menjadi modal sosial-keagamaan yang menghubungkan berbagai kelompok masyarakat. Kondisi tersebut sangat relevan untuk membaca Surakarta. Perkembangan tarekat di lingkungan keraton tidak berlangsung secara terisolasi, tetapi melalui jaringan sanad ulama Nusantara dan interaksi dengan lingkungan bangsawan. Ajaran Syattariyah juga mengalami penyesuaian dengan kebudayaan lokal, sedangkan bangsawan berperan dalam memperluas penerimaan tarekat di masyarakat (Azmirrijali et al., 2026). Temuan ini memberikan implikasi penting: perubahan sosial keagamaan di Surakarta tidak semata-mata merupakan hasil masuknya ide-ide Islam modern dari luar, tetapi juga merupakan proses transformasi internal tradisi Islam lokal yang telah memiliki basis sosial kuat sejak periode sebelumnya.

Perubahan sosial awal abad ke-20 semakin intensif ketika Surakarta mengalami perkembangan ekonomi perkotaan dan meningkatnya persaingan antarkelompok masyarakat. Pertumbuhan perdagangan batik, mobilitas pedagang, perkembangan kelas menengah Muslim, serta ketegangan sosial-ekonomi dengan kelompok pedagang Tionghoa menjadi salah satu konteks munculnya Sarekat Dagang Islam pada 1905.

Penelitian terbaru mengenai SDI Surakarta menunjukkan organisasi tersebut periode 1905–1916 berkembang dari wadah ekonomi pedagang Muslim menjadi sarana konsolidasi sosial dan pembentukan identitas kolektif melalui solidaritas keislaman (Priyogo, 2025). Dalam konteks ini, jaringan keagamaan dan jaringan ekonomi saling beririsan. Identitas Muslim tidak hanya berfungsi sebagai identitas ritual, tetapi juga menjadi basis solidaritas sosial dalam menghadapi perubahan struktur ekonomi kolonial.

Perubahan tersebut memperlihatkan ulama tidak hanya berfungsi sebagai penjaga ortodoksi, tetapi juga sebagai mediator perubahan. Di Surakarta, jaringan ulama dapat ditemukan pada beberapa poros, antara lain Pangulon–Kauman, Pondok Jamsaren, dan Keprabon. Menurut Ali (2021), tokoh-tokoh seperti K.H. Bagus Arofah, K.H. Mohammad Adnan, K.H. Abu Amar, K.H. Imam Gozali, H. Mohammad Misbach, dan K. Moechtar Boechari berada dalam jaringan yang berinteraksi dengan K.H. Ahmad Dahlan dan wacana pembaruan Islam. Interaksi tersebut kemudian berkontribusi pada munculnya SATV pada 1918, Muhammadiyah Cabang Surakarta pada 1922, dan Perserikatan Al-Islam pada 1928. Dengan demikian, batas antara "ulama tradisional" dan "pembaru" tidak selalu bersifat tegas. Jaringan intelektual memungkinkan pertukaran gagasan dan membuka ruang bagi transformasi internal masyarakat Muslim.

Dalam konteks ini, tarekat dan gerakan pembaruan Islam sebaiknya tidak selalu diposisikan sebagai dua kutub yang saling berlawanan. Terdapat perbedaan orientasi mengenai ritual, otoritas keagamaan, pendidikan, dan cara merespons modernitas. Pada tingkat jaringan sosial, keduanya dapat memiliki titik temu berupa perhatian pada pendidikan, moralitas, solidaritas umat, dan peningkatan kapasitas sosial masyarakat. Kota ini menjadi arena munculnya model gerakan Islam baru yang tidak hanya bersifat ritual, tetapi juga berkaitan dengan dinamika sosial dan politik masyarakat perkotaan. Dari sudut pandang teori perubahan sosial, fenomena tersebut dapat dibaca melalui konsep continuity and change. Tarekat tidak mengalami perubahan dengan meninggalkan seluruh tradisi masa lalu, tetapi melakukan seleksi terhadap unsur-unsur tradisi yang dianggap tetap relevan. Pada saat yang sama, sebagian ulama mengadopsi strategi baru dalam pendidikan, organisasi, dakwah, dan relasi sosial. Pola ini dapat dibandingkan dengan temuan Nasrudin mengenai Tarekat Naqsyabandiyah Khalidiyah dan Syadziliyah di Sokaraja. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa tarekat mampu beradaptasi dengan

perubahan sosial-ekonomi dan bahkan berkontribusi terhadap penguatan ekonomi masyarakat melalui jaringan sosial dan aktivitas produktif (Nasrudin, 2021). Spiritualitas tarekat tidak harus berujung pada asketisme sosial; dalam kondisi tertentu ia justru dapat menghasilkan bentuk kesalehan sosial.

Dalam konteks Surakarta, pesantren menjadi institusi penting yang menghubungkan tarekat dengan perubahan sosial. Pesantren bukan hanya tempat transmisi pengetahuan agama, tetapi juga ruang reproduksi ulama dan pembentukan jaringan intelektual. Jaringan genealogis intelektual ulama pesantren di wilayah Surakarta berkembang sejak abad ke-20 dan terus berlanjut hingga masa Orde Baru. Regenerasi ulama berlangsung melalui sistem pendidikan pesantren sehingga menghasilkan kesinambungan otoritas keagamaan lintas generasi (Alam, 2018). Pesantren dapat dipahami sebagai infrastruktur sosial tarekat, sementara ulama menjadi aktor yang menerjemahkan ajaran keagamaan ke dalam kehidupan sosial.

Transformasi tersebut berkaitan dengan munculnya bentuk baru otoritas keagamaan. Sebelum abad ke-20, legitimasi ulama terutama dibangun melalui sanad keilmuan, kedalaman penguasaan kitab, hubungan dengan guru, dan reputasi kesalehan. Memasuki abad ke-20, sumber legitimasi tersebut semakin berinteraksi dengan kemampuan organisasi, pendidikan modern, kemampuan berkomunikasi di ruang publik, dan keterlibatan dalam persoalan sosial. Otoritas keagamaan menjadi semakin plural. Seorang ulama dapat memperoleh legitimasi sekaligus dari pesantren, tarekat, organisasi Islam, pendidikan, maupun jaringan sosial-ekonomi. Perubahan ini melalui perspektif Talal Asad (1993) tentang *discursive tradition*. Tradisi Islam bukanlah warisan yang pasif, tetapi sebuah tradisi diskursif yang selalu diproduksi melalui praktik, otoritas, dan perdebatan mengenai bagaimana ajaran Islam seharusnya diterapkan. Tarekat, pesantren, organisasi Islam, dan ulama di Surakarta pada awal abad ke-20 merupakan arena tempat tradisi tersebut dinegosiasikan. Pertanyaan mengenai hubungan antara ritual dan kehidupan sosial, tradisi dan modernitas, otoritas kiai dan organisasi, serta Islam dan perubahan kolonial semuanya menjadi bagian dari proses pembentukan kembali tradisi Islam.

Perubahan sosial tersebut tidak dapat dilepaskan dari kolonialisme. Struktur ekonomi dan politik kolonial menghasilkan ketimpangan, diferensiasi sosial, serta

perubahan pola mobilitas masyarakat. Jaringan keagamaan berfungsi sebagai mekanisme solidaritas dan artikulasi kepentingan kolektif. Studi mengenai Sarekat Islam di Surakarta menunjukkan meningkatnya ketegangan sosial dan ekonomi pada awal abad ke-20 mendorong terbentuknya organisasi yang berfungsi sebagai bentuk resistensi dan pertahanan sosial masyarakat pribumi Muslim (Rahmana, 2017). Agama menjadi sumber identitas sekaligus sumber energi sosial dalam menghadapi perubahan kolonial. Hal yang menarik adalah bahwa perubahan tersebut tidak menghasilkan satu bentuk Islam yang seragam. Sebaliknya, Surakarta menjadi ruang pluralisasi otoritas dan strategi keberagamaan. Tarekat mempertahankan dimensi spiritual dan sanad; pesantren mempertahankan transmisi ilmu klasik; organisasi modern menawarkan model pendidikan dan mobilisasi baru; sedangkan kelompok pedagang dan masyarakat kota mengembangkan bentuk solidaritas ekonomi-politik. Berbagai aktor tersebut saling berinteraksi dan terkadang berkompetisi, tetapi justru melalui interaksi tersebut terbentuk ekologi Islam perkotaan yang dinamis.

Tarekat dan ulama pada awal abad ke-20 tidak dapat dipandang sebagai residu tradisional yang secara perlahan akan hilang karena modernisasi. Sebaliknya, keduanya merupakan aktor aktif dalam produksi perubahan sosial. Tarekat menyediakan jaringan solidaritas dan spiritualitas, ulama menyediakan otoritas pengetahuan dan kepemimpinan moral, pesantren menyediakan mekanisme regenerasi intelektual, sementara organisasi modern menyediakan bentuk baru mobilisasi sosial. Dalam kasus Surakarta, hubungan antara unsur-unsur tersebut menghasilkan proses transformasi yang bersifat selektif: mempertahankan sanad, tradisi keilmuan, dan spiritualitas sekaligus membuka ruang bagi pendidikan, organisasi, solidaritas ekonomi, dan keterlibatan sosial. Karena itu, perubahan sosial Muslim Surakarta pada awal abad ke-20 lebih tepat dipahami sebagai negosiasi kreatif antara kontinuitas tradisi Islam dan tuntutan perubahan zaman, bukan sebagai pergantian sederhana dari Islam tradisional menuju Islam modern.

CONCLUSIONS

Dinamika sejarah keagamaan di Surakarta memperlihatkan jalinan yang amat kompleks antara dorongan menjaga ortodoksi Islam dan keniscayaan melakukan sintesis dengan tradisi lokal Jawa, di mana peranan tarekat sufi dan jaringan ulama menjadi pilar

utama pembentuk kontur peradaban tersebut. Sejak masa peralihan Mataram Islam hingga berdirinya Keraton Surakarta Hadiningrat, ruang keagamaan di wilayah ini tidak pernah bersifat tunggal atau statis, melainkan menjadi arena perjumpaan yang hidup antara teks-teks normatif syariat yang diusung oleh para ulama transnasional dan penghayatan kebatinan lokal yang telah berakar kuat di dalam kebudayaan masyarakat. Jaringan ulama, yang terhubung melalui transmisi keilmuan pesantren, jalur haji ke Tanah Hijaz, serta hubungan kiai-santri, membawa arus pembaruan dan pemurnian yang secara konsisten menegaskan pentingnya ketaatan terhadap aturan-aturan keagamaan universal, sementara di sisi lain, tarekat-tarekat sufi seperti Qadiriyah, Naqshabandiyah, maupun Syattariyah menyediakan jembatan spiritual yang fleksibel untuk menyelaraskan kebenaran esa tersebut dengan tradisi kosmis keraton dan ritual kemasyarakatan yang sudah ada. Dalam dinamika ini, Sufisme tidak hadir sebagai penentang syariat, melainkan sebagai media penyesuaian yang memungkinkan simbol-simbol local seperti upacara adat, falsafah kebatinan, dan keterikatan pada otoritas spiritual raja diberi makna dan ruh baru yang bernapaskan Tauhid tanpa mengikis fondasi kebudayaan aslinya.

Kepemimpinan para ulama dan syekh tarekat di Surakarta sering kali bertindak sebagai negosiator budaya yang ulung, di mana mereka berhasil menanamkan doktrin-doktrin ortodoksi melalui mediasi bahasa, estetika, dan ritual lokal, sehingga batasan antara Islam yang "murni" dan tradisi yang "lokal" menjadi sangat cair dan saling melengkapi. Keberadaan jaringan ulama yang terorganisir di sekitar kompleks keraton maupun di wilayah pinggiran atau desa-desa santri tidak hanya memperkuat posisi Islam sebagai identitas moral warga, tetapi juga menciptakan mekanisme penyeimbang terhadap otoritas politik tradisional yang kadang memiliki pemaknaan spiritualnya sendiri. Proses perjumpaan ini melahirkan apa yang sering disebut sebagai sintesis mistik Jawa, sebuah bentuk kesadaran keagamaan di mana ketaatan pada hukum keagamaan dan kedalaman pengalaman esoteris sufi dapat berjalan berdampingan secara harmonis dengan nilai-nilai lokalitas Surakarta. Melalui transmisi kitab-kitab klasik, pengajaran tarekat, dan ritus-ritus keagamaan yang melibatkan seluruh lapisan social dari kalangan elit keraton hingga rakyat jelata Surakarta berkembang menjadi pusat peradaban Islam yang kaya akan keanekaragaman penafsiran dan ketahanan budaya. Oleh karena itu, navigasi antara penjagaan ortodoksi yang tegas dan keterbukaan terhadap sintesis lokal

tidak hanya mencerminkan adaptabilitas Islam di tanah Jawa, menegaskan sejarah keagamaan Surakarta adalah hasil dari negosiasi berkelanjutan yang secara terus-menerus membentuk, merajut kembali, dan memperkaya identitas spiritual serta sosiokultural masyarakatnya sepanjang melintasi lintasan zaman yang terus berubah.

REFERENCES

Ali, M. (2021). K.H. Ahmad Dahlan dalam jaringan ulama di Surakarta awal abad ke-20. *Suhuf, 33*(2), 232–250. https://doi.org/10.23917/suhuf.v33i2.16588

Ali, M., Apriantoro, M., Fauzi, I., et al. (2025). Institutionalization and renewal of traditional Islamic education in Surakarta, Indonesia (1905–1942). *Journal of Islamic Thought and Civilization, 15*(2), 327–347. https://doi.org/10.32350/jitc.152.18

Alam, M. B. S. (2018). The formed of ulama pesantren intellectual genealogy networks in Surakarta region at the early 20th century until New Order era. *Indonesian Journal of Social Sciences, 10*(2), 39–46.

Anwar, K. (2016). Pesantren, kiai dan tarekat. *Al-Qalam, 22*(2).

Asad, T. (1993). *Genealogies of religion: Discipline and reasons of power in Christianity and Islam*. Johns Hopkins University Press.

Azmirrijali, Z., Yusuf, A. A., Krisantya, M. L., & Islahuddin. (2026). Antara ulama dan bangsawan: Kontribusi dalam ekspansi Tarekat Syattariyah di Kasunanan Surakarta pada abad ke-19. *Al-Isnad: Journal of Islamic Civilization History and Humanities, 7*(1), 143–164. https://doi.org/10.22515/isnad.v7i01.14943

Azra, A. (2004). *The origins of Islamic reformism in Southeast Asia: Networks of Malay-Indonesian and Middle Eastern ʿulamāʾ in the seventeenth and eighteenth centuries*. Allen & Unwin.

Azra, A. (2014). Networks of the ulama in the Haramayn: Connections in the Indian Ocean region. *Studia Islamika, 8*(2). https://doi.org/10.15408/sdi.v8i2.689

Bruinessen, M. van. (1995). *Tarekat Naqsyabandiyah di Indonesia: Survei historis, geografis, dan sosiologis*. Mizan.

Bruinessen, M. van. (2012). *Kitab kuning, pesantren, dan tarekat: Tradisi-tradisi Islam di Indonesia*. Gading Publishing.

Faturangga, D. A., Fuadi, M. A., Maghribi, H., & Mashar, A. (2024). Relasi intelektual Kasunanan Surakarta dengan Pesantren Gebang Tinatar Tegalsari, Jetis, Ponorogo tahun 1800–1862. *Al-Isnad: Journal of Islamic Civilization History and Humanities, 5*(1). https://doi.org/10.22515/isnad.v5i01.9624

Florida, N. K. (2007). *Writing the past, inscribing the future: History as prophecy in colonial Java*. Duke University Press.

Florida, N. K. (2019). Shaṭṭāriyya Sufi scents: The literary world of the Surakarta palace in nineteenth-century Java.

Fuadi, M. A., Mahbub, M., Safitry, M., Usman, U., Rohmatulloh, D. M., & Muzakki, M. H. (2022). Pesantren tradition and the existence of Tarekat Syattariyah in the Java War of 1825–1830. *Tsaqafah, 18*(1).

Geertz, C. (1960). *The religion of Java*. University of Chicago Press.

Hakim, L., Arsa, D., Meria, A., & Sandora, L. (2021). Analisis historiografi terhadap pemikiran Azyumardi Azra dalam jaringan ulama. *Jurnal Lektur Keagamaan, 18*(2).

Howell, M. C., & Prevenier, W. (2001). *From reliable sources: An introduction to historical methods*. Cornell University Press.

Kersten, C. (2017). *A history of Islam in Indonesia: Unity in diversity*. Edinburgh University Press.

Laffan, M. E. (2011). *The makings of Indonesian Islam: Orientalism and the narration of a Sufi past*. Princeton University Press.

Nasrudin. (2021). *Tarekat dan perubahan sosial: Studi pada Tarekat Naqsabandiyah Khalidiyah dan Syadziliyah di Sokaraja-Banyumas* (Disertasi doktoral, UIN Walisongo Semarang).

Priyogo, A. (2025). *Kohesi sosial masyarakat Muslim: Studi kasus Sarekat Dagang Islam di Surakarta 1905–1916 M* [Skripsi, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto].

Qomariyyah, N., & Saifuddin, A. (2022). Ṭarīqa followers and inner peace: A phenomenological study of Naqshbandiyya-Khālidiyya order in Indonesia. *Teosofia: Indonesian Journal of Islamic Mysticism, 11*(1), 1–22.

Rahmana, S. (2017). Sarekat Islam: Mediasi perkecuan di Surakarta awal abad ke-20. *JUSPI (Jurnal Sejarah Peradaban Islam), 2*(1).

Ricklefs, M. C. (2006). *Mystic synthesis in Java: A history of Islamization from the fourteenth to the early nineteenth centuries*. EastBridge.

Ridwan, R., Humaidi, M. W., Makhasin, L., & Jamaluddin, J. (2026). Sufism and ulama networks: Re-examining Islam as discursive tradition in South-West Javanese regions. *Nurani: Jurnal Kajian Syari'ah dan Masyarakat, 26*(1). https://doi.org/10.19109/nurani.v26i1.31188

Sholikhah, F. N., Rohman, F. H., & Alimi, F. F. (2025). Beyond the sacred: Analyzing the transformation of Surakarta's Sekaten and its implications for Islamic teaching and learning. *Javanologi: International Journal of Javanese Studies, 9*(1).

Simuh. (2002). *Sufisme Jawa: Transformasi tasawuf Islam ke mistik Jawa*. Bentang Budaya